

EFEKTIVITAS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN UNTUK PENGENDALIAN BIAYA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Kusnan¹⁾, Aris Sunarya²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: kusnan.doang73@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian biaya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang berfokus pada lima indikator efektivitas menurut teori Riant Nugroho (2018), yaitu tepat program, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi langsung, serta dokumentasi dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban di BPKAD Provinsi Jawa Timur berjalan cukup efektif, didukung oleh regulasi yang jelas, komitmen pimpinan, serta koordinasi yang baik antarunit kerja. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman pegawai tentang manfaat sistem ini, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan teknologi. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan sosialisasi, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang lebih optimal.

Kata kunci: Akuntansi Pertanggungjawaban, Pengendalian Biaya, Efektivitas, BPKAD, Provinsi Jawa Timur.

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of implementing responsibility accounting in cost control at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of East Java Province. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach, focusing on five indicators of effectiveness according to Riant Nugroho's (2018) theory, namely the right program, the right implementer, the right target, the right environment, and the right process. Data were collected through in-depth interviews with relevant parties, direct observation, and documentation of official documents. The results of the study indicate that the implementation of responsibility accounting at BPKAD of East Java Province has been quite effective, supported by clear regulations, leadership commitment, and good coordination between work units. However, several obstacles were identified, such as employees' lack of understanding of the system's benefits, resistance to change, and technological limitations. The implications of this study highlight the need for increased socialization, continuous training, and strengthening technological infrastructure to support a more optimal implementation of responsibility accounting.

Keywords: *Responsibility Accounting, Cost Control, Effectiveness, BPKAD, East Java Province.*

LATAR BELAKANG

Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia (Salim, 2023). Ekonomi daerah Jawa Timur ditopang oleh besarnya potensi sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Infrastruktur yang lengkap, mulai dari bandara internasional, pelabuhan, hingga jaringan jalan tol, mendukung aktivitas ekonomi yang dinamis. Selain itu, Jawa Timur memiliki kekayaan alam berupa bahan tambang dan mineral yang berlimpah. Namun, potensi besar ini memerlukan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan merata. Akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan di Jawa Timur melalui pengelolaan keuangan yang efektif, yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta taraf hidup masyarakat (Assidikiyah et al., 2021).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur memegang peran strategis dalam proses tersebut. BPKAD bertanggung jawab melaksanakan penatausahaan keuangan daerah yang meliputi penerimaan, pengeluaran, dan pengawasan penggunaan dana. Dalam hal pengelolaan aset daerah, BPKAD berperan dalam inventarisasi, penilaian, serta penetapan status penggunaan aset (Rahmatilah et al., 2021). Selain itu, BPKAD juga mengelola aset daerah yang sudah tidak digunakan lagi, termasuk proses penghapusan dan pemanfaatan kembali, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah yang turut mengelola aset tersebut (Salim, 2023). Peran ini menempatkan BPKAD sebagai garda terdepan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengendalian biaya yang diterapkan BPKAD menjadi faktor krusial dalam memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Melalui pengendalian biaya yang efektif, BPKAD mampu memaksimalkan manfaat dari setiap rupiah yang dikeluarkan serta memastikan penggunaan anggaran secara tepat

guna. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah implementasi akuntansi pertanggungjawaban, yang berfungsi sebagai alat pengendalian terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan menekan pengeluaran yang tidak efektif (Mawuntu et al., 2022). Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang dirancang untuk mengumpulkan dan melaporkan data keuangan berdasarkan pusat pertanggungjawaban, seperti pusat biaya, pusat pendapatan, dan pusat investasi. Dengan sistem ini, laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi alat evaluasi kinerja setiap pusat pertanggungjawaban, sehingga memudahkan identifikasi penyimpangan dari anggaran yang telah ditentukan (Yadisar, 2023).

Laporan akuntansi pertanggungjawaban juga berperan dalam mendukung pengawasan internal. Manajemen BPKAD dapat dengan mudah mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi penggunaannya (Salesti et al., 2022). Selain itu, laporan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menjadi acuan dalam melakukan koreksi atas kinerja yang belum optimal (Jusmani & Mursalin, 2020). Dengan adanya sistem ini, setiap bagian dalam organisasi termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya karena hasil kinerja mereka akan terekam secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, implementasi akuntansi pertanggungjawaban di BPKAD Provinsi Jawa Timur menghadapi beberapa tantangan, seperti keterlambatan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah yang tidak sesuai dengan regulasi, yaitu harus disampaikan dalam jangka waktu tiga bulan setelah dana hibah diterima. Ketidaktepatan waktu ini menambah beban kerja tim akuntansi, yang sering kali harus lembur demi menyelesaikan laporan sesuai tenggat waktu yang ditentukan (Labangu et al., 2023). Selain itu, kurangnya sistem yang terintegrasi

menyebabkan proses pelaporan menjadi kurang efisien. Dalam beberapa kasus, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi pertanggungjawaban turut menjadi kendala.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang mampu mencatat setiap transaksi dengan akurat dan mendukung pembuatan laporan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku (Imelda Hutabarat, 2020). Penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan menjadi solusi yang perlu diterapkan secara optimal. Dengan adanya sistem berbasis teknologi, proses pencatatan transaksi, pelaporan, hingga evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan.

Setiap daerah memiliki karakteristik unik dalam pengelolaan keuangan dan aset. Dalam konteks Jawa Timur, penerapan akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan sistem yang jelas untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran dan mengendalikan biaya, BPKAD dapat memberikan keyakinan kepada publik bahwa dana yang dikelola digunakan secara optimal dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah (Hasna & Rachman, 2020). Oleh karena itu, penguatan akuntansi pertanggungjawaban menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur.

LANDASAN TEORITIS

Konsep Efektivitas Pelayanan Publik

Efektivitas pelayanan publik mengacu pada sejauh mana layanan yang diberikan oleh pemerintah atau penyelenggara layanan publik dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memenuhi harapan masyarakat. Efektivitas dapat dilihat dari kemampuan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan hasil

yang relevan, tepat waktu, dan berorientasi pada kualitas (Riani, 2021). Efektivitas pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir yang dicapai, tetapi juga proses dan cara pelayanan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, konsep efektivitas dalam pelayanan publik harus mencerminkan hasil yang optimal dan proses yang efisien.

Indikator efektivitas pelayanan publik dapat diukur melalui beberapa aspek utama, seperti pencapaian tujuan, kepuasan masyarakat, ketepatan waktu pelayanan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Hakim, 2022). Menurut Sinambela (2023), pelayanan publik yang efektif harus berfokus pada penyelesaian masalah masyarakat dan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Efektivitas juga dapat dilihat dari kemampuan pelayanan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, terutama di era yang semakin dinamis ini.

Dalam konteks pelayanan publik, efektivitas tidak dapat dipisahkan dari peran teknologi. Transformasi digital telah memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas layanan melalui pengembangan sistem informasi dan aplikasi berbasis digital (Yulianto, 2024). Sistem digital membantu meningkatkan aksesibilitas layanan, mengurangi waktu tunggu, dan meminimalkan kesalahan manusia dalam proses pelayanan. Selain itu, digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, sehingga menciptakan kenyamanan yang lebih besar dalam interaksi antara masyarakat dan pemerintah.

Efektivitas pelayanan publik juga dipengaruhi oleh aspek keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan. Menurut Rahman (2025), partisipasi masyarakat dalam berbagai tahap pelayanan publik dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan. Partisipasi ini tidak hanya menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat, tetapi juga memperkuat

akuntabilitas penyelenggara layanan publik terhadap masyarakat. Lebih lanjut, kepemimpinan dan komitmen penyelenggara layanan juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pelayanan publik. Kepemimpinan yang baik mampu memberikan arahan yang jelas, menetapkan prioritas, dan mendorong peningkatan kinerja organisasi (Rachman, 2023). Komitmen penyelenggara layanan terhadap kualitas dan inovasi dalam pelayanan merupakan kunci untuk memenuhi harapan masyarakat dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal. Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, efektivitas pelayanan publik dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Konsep Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem pengendalian manajemen yang dirancang untuk mengukur dan melaporkan kinerja manajer berdasarkan area tanggung jawabnya. Dalam sistem ini, organisasi dibagi menjadi pusat tanggung jawab seperti pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap manajer memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas keputusan yang diambil di dalam ruang lingkup kewenangannya (Horngren et al., 2020). Penekanan utama dari akuntansi pertanggungjawaban adalah pendelegasian wewenang dan akuntabilitas. Setiap manajer diberikan wewenang untuk mengambil keputusan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga harus mempertanggungjawabkan hasil dari keputusan tersebut. Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban, organisasi dapat mencapai efisiensi operasional melalui pelacakan kinerja yang berbasis data akuntansi (Mowen et al., 2021).

Selain itu, akuntansi pertanggungjawaban juga mendorong budaya transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan menetapkan tujuan dan indikator kinerja yang jelas, sistem ini memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi kontribusi dari setiap bagian dalam rangka pencapaian tujuan strategis.

Sistem ini sering kali digunakan bersamaan dengan anggaran sebagai alat pengendalian utama (Drury, 2022). Kemajuan teknologi pada era modern turut berkontribusi dalam pengembangan akuntansi pertanggungjawaban. Misalnya, integrasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) memungkinkan laporan akuntansi pertanggungjawaban dibuat secara real-time, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat (Simons, 2023). Ini juga mempermudah manajer untuk mendeteksi area yang memerlukan perbaikan.

Terakhir, penerapan akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya bermanfaat untuk manajemen internal, tetapi juga relevan dalam menjawab tuntutan pemangku kepentingan eksternal. Melalui pelaporan yang lebih terstruktur, organisasi dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata investor dan regulator. Hal ini memperkuat posisi organisasi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif (Kaplan & Atkinson, 2024).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola sumber daya keuangan dan aset daerah. BPKAD berperan dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021). Melalui perannya, BPKAD mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan mengelola anggaran, aset, dan pelaporan keuangan yang efektif.

Dalam operasionalnya, BPKAD berlandaskan pada berbagai kebijakan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan ini diimplementasikan melalui rencana strategis pemerintah daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), untuk memastikan penggunaan

anggaran daerah mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh BPKAD didasarkan pada prinsip-prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas. Transparansi diwujudkan dengan memberikan akses informasi keuangan yang jelas kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas tercermin dalam pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selain itu, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan menjadi prioritas guna mencapai dampak maksimal bagi pembangunan daerah (Pemerintah Kota Surabaya, 2022). Namun, BPKAD menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan tugasnya, seperti perubahan regulasi yang cepat, keterbatasan sumber daya manusia, dan kebutuhan akan digitalisasi pengelolaan keuangan. Salah satu inovasi yang dapat membantu mengatasi tantangan ini adalah implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), yang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan anggaran.

Keberadaan BPKAD menjadi sangat relevan dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan keuangan dan aset yang baik, BPKAD dapat memastikan anggaran daerah digunakan untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, optimalisasi pengelolaan aset daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, yang pada akhirnya memperkuat kemandirian fiskal daerah (Pemerintah Kota Surabaya, 2022).

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai efektivitas penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian biaya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami proses penerapan akuntansi pertanggungjawaban, faktor pendukung, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem tersebut.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian biaya pada BPKAD Provinsi Jawa Timur. Evaluasi dilakukan berdasarkan lima indikator efektivitas menurut teori Riant Nugroho (2018), yaitu tepat program, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban di lingkungan BPKAD.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena BPKAD memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah serta menjadi pusat penerapan akuntansi pertanggungjawaban di tingkat provinsi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan kepada narasumber yang berperan langsung dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban, seperti Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Tim Kerja Akuntansi.
2. Observasi: Mengamati secara langsung proses penerapan akuntansi pertanggungjawaban, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
3. Dokumentasi: Mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan, peraturan terkait,

serta hasil audit internal yang berkaitan dengan pengendalian biaya di BPKAD.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Efektivitas Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem informasi yang bertujuan mengumpulkan dan memproses data sehingga menghasilkan laporan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Akuntansi pertanggungjawaban menjadi metode yang banyak digunakan karena memungkinkan pencatatan seluruh aktivitas yang tidak berjalan secara efektif dan efisien. Keberhasilan akuntansi pertanggungjawaban tercermin dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang mudah dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, serta dapat diandalkan dan dibandingkan.

Karakteristik unik dari akuntansi pertanggungjawaban, seperti penekanan pada pertanggungjawaban daripada sekadar penghitungan, pembagian organisasi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban, serta integrasinya dengan manajemen strategis, membuka jalan bagi praktik manajemen yang lebih bertanggung jawab dan efektif. Dalam penelitian ini, penerapan akuntansi pertanggungjawaban dianalisis menggunakan teori dari Riant Nugroho (2018) yang mencakup lima indikator, yaitu tepat program, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Tepat Program

Tepat program mencakup kebijakan dan program yang dibuat oleh BPKAD dalam mendukung pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban untuk pengendalian biaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kholiq Abdillah dan M. Fuad

Rahmawan, S.E., M.M., selaku Sekretaris BPKAD dan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, disimpulkan bahwa penerapan program akuntansi pertanggungjawaban di BPKAD Provinsi Jawa Timur dirancang untuk memastikan pengendalian biaya yang efektif. Program ini melibatkan penggunaan perangkat lunak akuntansi terbaru serta pelatihan berkala bagi staf guna memastikan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi pertanggungjawaban. Setiap unit kerja memiliki anggaran yang jelas serta target kinerja spesifik yang dipantau secara *real-time*.

2. Tepat Pelaksana

Tepat pelaksana mencakup aktor-aktor pelaksana kebijakan serta pembagian tugas dan wewenangnya dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibnu Arief Effendi, S.Sos., M.M. dan Kristanto, S.E., M.M., selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Katimja Akuntansi, disimpulkan bahwa pelaksana utama dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah staf di unit akuntansi dan keuangan, yang dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman. Staf menerima pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian biaya. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksana tetap memenuhi standar yang ditetapkan.

3. Tepat Target

Tepat target mencakup sasaran penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian biaya, apakah berupa target baru atau pembaruan dari target sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Fuad Rahmawan, S.E., M.M. dan Kuswono selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta Katimja Sekretariat, disimpulkan bahwa target dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban ditentukan

berdasarkan analisis kebutuhan dan proyeksi keuangan. Setiap unit kerja memiliki target yang jelas terkait pengendalian biaya dan pencapaian anggaran. Pemantauan target dilakukan melalui laporan bulanan dan kuartalan. Audit berkala juga dilakukan guna memastikan target tercapai serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

4. Tepat Lingkungan

Tepat lingkungan mencakup interaksi internal dan eksternal dalam pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban di BPKAD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kholiq Abdillah dan Kuswono, disimpulkan bahwa proses penerapan akuntansi pertanggungjawaban di BPKAD melibatkan beberapa tahap yang diawasi secara ketat, mulai dari perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, hingga pelaporan dan evaluasi. Koordinasi antarunit kerja juga ditingkatkan melalui tim koordinasi yang membantu mengatasi hambatan dalam proses serta memastikan kelancaran aliran informasi di seluruh organisasi. Evaluasi berkala terhadap proses dilakukan guna memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

5. Tepat Proses

Tepat proses mencakup pemahaman publik, respons publik, serta pelaksanaan terkait penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Fuad Rahmawan, S.E., M.M. dan Kuswono, disimpulkan bahwa proses penerapan akuntansi pertanggungjawaban di BPKAD melibatkan beberapa tahap yang diawasi secara ketat, mulai dari perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, hingga pelaporan dan evaluasi. Tim koordinasi antarunit kerja berperan penting dalam mengatasi hambatan yang muncul selama proses berlangsung serta memastikan aliran informasi yang lancar di seluruh organisasi. Evaluasi berkala dilakukan guna

memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban di BPKAD Provinsi Jawa Timur melibatkan program yang terstruktur dan disesuaikan dengan kebutuhan pengendalian biaya. Pelaksana dipilih berdasarkan kompetensi, dengan target yang ditentukan melalui analisis yang mendalam. Lingkungan internal dan eksternal selalu dipertimbangkan dalam setiap tahap proses penerapan. Dukungan teknologi serta koordinasi antarunit kerja memastikan bahwa proses berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa BPKAD telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pertanggungjawaban dengan baik, sesuai dengan teori Riant Nugroho (2018), yaitu tepat program, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Kendala dan tantangan yang dihadapi pun diatasi melalui komitmen manajemen dan pelatihan berkelanjutan bagi staf.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

Dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, terdapat berbagai aspek yang memengaruhi efektivitas dan keberhasilan pelaksanaannya. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu sistem yang dirancang untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan setiap unit kerja untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran serta kinerjanya kepada pihak yang lebih tinggi, guna memastikan bahwa sumber daya yang dikelola telah digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Meski implementasi sistem ini dapat memberikan manfaat besar, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut. Pemahaman terhadap kedua

faktor ini menjadi penting untuk mengevaluasi tantangan dan potensi yang ada, sehingga penerapan akuntansi pertanggungjawaban dapat berjalan lebih optimal.

1. Faktor Pendukung

Adanya regulasi dan aturan yang terkait dengan implementasi akuntansi pertanggungjawaban menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat penting. Regulasi yang jelas dan komprehensif tidak hanya memberikan landasan hukum yang kuat, tetapi juga menetapkan pedoman, standar, dan prosedur yang harus diikuti oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal ini memastikan konsistensi dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan, sekaligus meningkatkan transparansi dalam manajemen keuangan sektor publik. Selain itu, regulasi juga menyediakan kerangka kerja yang membantu para pemangku kepentingan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga implementasi akuntansi pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Kebijakan yang terarah ini mampu menciptakan sinergi antara unit kerja di lingkungan BPKAD, yang secara keseluruhan mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan efisien.

Tidak hanya itu, regulasi ini memberikan kejelasan mengenai bagaimana akuntansi pertanggungjawaban harus diintegrasikan dengan sistem manajemen keuangan yang lebih luas. Dengan adanya regulasi yang tepat, BPKAD dapat memastikan bahwa proses pelaporan keuangan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Regulasi ini juga mengurangi risiko adanya penyimpangan dalam pelaporan keuangan karena telah menyediakan standar yang harus dipatuhi. Sebagai tambahan, dukungan dari pemerintah daerah dan pemimpin organisasi dalam menerapkan regulasi ini memberikan dorongan lebih untuk

keberhasilan implementasi. Komitmen dari pemimpin menjadi motivasi utama bagi pegawai dalam mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip akuntansi pertanggungjawaban.

2. Faktor Penghambat

Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban di BPKAD Provinsi Jawa Timur. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman mendalam di tingkat unit kerja tentang manfaat dari sistem akuntansi ini. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, banyak pegawai yang masih belum memahami bagaimana akuntansi pertanggungjawaban dapat memberikan nilai tambah bagi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sering kali menyebabkan resistensi atau bahkan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya memperlambat proses implementasi.

Tantangan lainnya adalah mengubah pola pikir atau mindset pegawai agar lebih berorientasi pada akuntabilitas kinerja. Banyak pegawai masih melihat akuntansi pertanggungjawaban sebagai beban tambahan dalam pekerjaan mereka, tanpa memahami bahwa sistem ini sebenarnya dirancang untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kurangnya pelatihan intensif untuk memperkenalkan konsep dan manfaat dari akuntansi pertanggungjawaban juga berkontribusi pada rendahnya tingkat penerimaan di kalangan pegawai. Tanpa pemahaman yang jelas, pegawai tidak hanya kesulitan dalam menjalankan sistem ini, tetapi juga cenderung meremehkan urgensinya bagi pengelolaan keuangan yang lebih transparan.

Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya dukungan teknologi yang memadai untuk mendukung penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Sistem pencatatan manual atau ketiadaan

aplikasi keuangan yang terintegrasi sering kali menjadi hambatan besar dalam memastikan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Ketidakterampilan pegawai dalam mengoperasikan teknologi yang relevan juga menjadi penghalang lain. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan berbasis teknologi harus menjadi prioritas utama dalam mengatasi hambatan ini. Tanpa langkah-langkah strategis ini, upaya untuk menerapkan akuntansi pertanggungjawaban yang efektif akan terus menghadapi kendala yang berulang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, penerapan akuntansi pertanggungjawaban di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam mendukung pengendalian biaya. Hal ini sesuai dengan teori Riant Nugroho (2018), yang mencakup lima indikator utama, yaitu Tepat Program, Tepat Pelaksana, Tepat Target, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses. BPKAD telah merancang program dengan penggunaan perangkat lunak akuntansi modern dan pelatihan berkala bagi staf untuk memastikan pengendalian biaya yang optimal. Pelaksana utama dipilih berdasarkan kompetensi, didukung evaluasi kinerja secara rutin, sedangkan target biaya dan anggaran dipantau melalui laporan serta audit berkala. Proses penerapan melibatkan perencanaan, pencatatan, pelaporan, hingga evaluasi yang dikoordinasikan antarunit kerja guna menjaga kelancaran implementasi sistem ini. Dukungan regulasi yang jelas dan komitmen pemerintah daerah menjadi faktor pendukung utama yang memberikan arahan dan motivasi bagi unit kerja untuk menjalankan prinsip-prinsip akuntansi pertanggungjawaban secara konsisten.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi implementasi akuntansi pertanggungjawaban di BPKAD.

Kurangnya pemahaman mendalam di tingkat unit kerja mengenai manfaat akuntansi pertanggungjawaban sering kali memunculkan resistensi atau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Tantangan lain adalah perubahan pola pikir pegawai, di mana sebagian besar melihat sistem ini sebagai beban tambahan daripada alat yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Hambatan juga ditemukan pada kurangnya dukungan teknologi yang memadai, seperti perangkat lunak keuangan terintegrasi dan keterampilan teknis dalam penggunaannya. Ketiadaan infrastruktur teknologi ini memengaruhi efektivitas pelaporan serta pengendalian biaya. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan pelatihan SDM, investasi teknologi, dan penguatan sosialisasi untuk mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntansi pertanggungjawaban.

Rekomendasi

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan akuntansi pertanggungjawaban di BPKAD Provinsi Jawa Timur, diantaranya:

1. Bagi Peneliti dalam Bidang Sejenis: Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengeksplorasi lebih dalam efektivitas penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam berbagai aspek lain, seperti pengendalian anggaran pada program strategis atau evaluasi dampaknya terhadap pencapaian kinerja organisasi. Peneliti juga dapat mengembangkan metode baru dalam pengukuran tingkat keberhasilan sistem akuntansi pertanggungjawaban, dengan mempertimbangkan integrasi teknologi digital yang lebih mutakhir.
2. Bagi Kebijakan dan Solusi Praktis: Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi yang relevan, seperti sistem keuangan terintegrasi dan aplikasi berbasis digital. Selain itu, kebijakan pelatihan dan

sosialisasi secara rutin harus diperkuat, guna memastikan pemahaman seluruh staf terhadap manfaat dan prinsip akuntansi pertanggungjawaban. Langkah ini juga termasuk perubahan pola pikir pegawai melalui pendekatan komunikasi yang mendorong budaya akuntabilitas dan transparansi.

3. Bagi Perbaikan, Teori, dan Metode: Dalam konteks teori, pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mendukung penerapan akuntansi pertanggungjawaban dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan digitalisasi dan efisiensi operasional organisasi. Metode evaluasi implementasi sistem ini dapat disempurnakan dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang lebih spesifik dan terukur. Selain itu, penerapan akuntansi pertanggungjawaban di BPKAD dapat menjadi model yang dikaji ulang untuk perbaikan prosedur dan pengelolaan keuangan sektor publik yang lebih efektif.

REFERENSI

- Assidikiyah, N., Marseto, M., & Sishadiyati, S. (2021). Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur (Sebelum dan Saat Terjadi Pandemi Covid-19). *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 102–115. <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.11017>
- Drury, C. (2022). *Management and Cost Accounting*. London: Cengage Learning.
- Hakim, T. (2022). Evaluasi Indikator Efektivitas Pelayanan Publik. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(1), 45–58.
- Hasna, D. L., & Rachman, R. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Penilaian Kinerja pada PT Taspen (Persero) Kc Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 67–76. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i1.422>
- Horngren, C. T., Datar, S. M., Rajan, M. V. (2020). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Imelda Hutabarat, M. (2020). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Evaluasi Kinerja PT Gunung Selamat Lestari Labuhan Batu Selatan. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5(3), 55–67.
- Jusmani, J., & Mursalin, M. (2020). Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Pengendalian Biaya Administrasi dan Umum. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(1), 43. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i1.4335>
- Kaplan, R. S., & Atkinson, A. A. (2024). *Advanced Management Accounting*. Boston: McGraw Hill.
- Labangu, Y. L., Arifuddin, & Asmawati. (2023). Penerapan Akuntansi Pertanggung Jawaban Anggaran sebagai Alat Pengendalian Biaya pada PT. Pegadaian Cabang Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(01), 272–283. <http://jak.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/57>
- Mawuntu, P., Rares, J., & Plangiten, N. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro dalam Penyebaran COVID-19 di Desa Warembungan. *Jurnal Administrasi Publik*, VIII(118), 107–118.
- Mowen, M. M., Hansen, D. R., Heitger, D. L. (2021). *Cornerstones of Managerial Accounting*. Mason, OH: South-Western Cengage Learning.
- Rachman, F. (2023). Kepemimpinan dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik. *Jurnal Manajemen Publik*, 14(3), 78–91.
- Rahman, A. (2025). Partisipasi Masyarakat sebagai Faktor Pendukung Pelayanan Publik. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 15(2), 100–112.
- Rahmatilah, N. A., Miradhia, D., & Runiawati, N. (2021). Efektivitas Program Mal Grha Tiyasa sebagai Model Pelayanan Publik

- di Kota Bogor. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 96. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.35043>
- Riani, D. (2021). Konsep Efektivitas dalam Pelayanan Publik: Perspektif dan Praktik. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(4), 200–213.
- Salesti, J., Syafruddin, S., & Saputra, O. (2022). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 16(1), 61–69. <https://doi.org/10.33373/mja.v16i1.4212>
- Salim, H. (2023). Fenomena Urbanisasi Kota Surabaya (Studi Pertambahan Penduduk Berusia Muda). *Prosiding Seminar Nasional*, 938–946.
- Simons, R. (2023). *Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy*. Boston: Harvard Business Review Press.
- Sinambela, L. (2023). Efisiensi dan Efektivitas dalam Sistem Pelayanan Publik. *Jurnal Etika Pemerintahan*, 13(2), 87–100.
- Yadisar, A. M. (2023). Manajemen Pengelolaan Aset Daerah. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1). <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.722>
- Yulianto, T. (2024). Digitalisasi Layanan Publik sebagai Penunjang Efektivitas. *Jurnal Teknologi dan Administrasi*, 16(3), 122–134.

